

MANAJEMEN LOGISTIK TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Ilmiah Qolbi Akbar
NPP. 32.0529

Asdaf Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: 32.0529@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Bertha Lubis, S.Sos., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): This study focuses on the issues of emergency logistics management for hydro-meteorological disasters in Blitar City, related to the limited warehouse capacity and lack of personnel at the Blitar City BPBD. **Purpose:** The aim of this study is to analyze the emergency logistics management for hydro-meteorological disasters in Blitar City. **Method:** This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document studies. The theory applied in the operationalization of this research concept is H. Subagya's (1990) logistics management function theory, which covers planning, budgeting, procurement, storage, maintenance, disposal, and logistics control functions. Primary data was collected through interviews with informants, including the Head of BPBD of Blitar City, the Secretary of BPBD, the Head of the Prevention, Preparedness, and Logistics Division, as well as staff directly involved in logistics management. Secondary data in the form of related documents, policies, and BPBD activity reports were also used to support the analysis. **Results:** The results indicate that BPBD Blitar City operates emergency logistics management functions through several key dimensions. Planning is conducted by directly visiting disaster sites to determine logistical needs. Procurement involves stock evaluations and budgeting through coordination with relevant agencies. Budgeting is done using the APBD and emergency funds for urgent needs. Logistics maintenance is carried out with regular checks on items approaching expiration. Storage and distribution follow a FIFO system to ensure timely distribution. Disposal is carried out for unusable goods through distribution or auctions. Control ensures the logistics process is efficient and transparent through coordination between BPBD. **Conclusion:** Efficient logistics management is crucial for mitigating the impact of disasters. Therefore, it is necessary to increase storage capacity, augment personnel, and implement regular maintenance of logistics to ensure that resources are available when required. These efforts will strengthen the preparedness of BPBD Blitar City in responding to disasters. **Keywords:** Logistics management, hydrometeorological disasters, BPBD, logistics distribution, emergency response.

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada masalah manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar pada sempitnya kapasitas gudang dan kurangnya personel di BPBD Kota Blitar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam operasionalisasi konsep penelitian ini adalah teori fungsi manajemen logistik menurut H. Subagya (1990), yang mencakup fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian logistik. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Blitar, Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik, serta staf yang terlibat langsung dalam manajemen logistik. Data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait kebijakan dan laporan kegiatan BPBD Kota Blitar juga digunakan untuk mendukung analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Blitar menjalankan fungsi manajemen logistik tanggap darurat melalui beberapa dimensi utama. Perencanaan dilakukan dengan turun langsung ke lokasi bencana untuk menentukan kebutuhan logistik. Pengadaan logistik melibatkan evaluasi stok dan penganggaran melalui koordinasi dengan instansi terkait. Penganggaran menggunakan dana APBD dan dana darurat untuk kebutuhan mendesak. Pemeliharaan logistik dilakukan dengan pengecekan rutin terhadap barang yang mendekati kedaluwarsa. Penyimpanan dan penyaluran menggunakan sistem FIFO untuk memastikan distribusi yang tepat. Penghapusan dilakukan terhadap barang yang tidak layak pakai, melalui distribusi atau lelang. Pengendalian memastikan proses logistik efisien dan transparan dengan koordinasi antar BPBD. **Kesimpulan:** Manajemen logistik yang efisien sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Untuk itu, perlu meningkatkan kapasitas gudang, menambah personel, dan melakukan pemeliharaan logistik secara rutin agar barang siap digunakan saat dibutuhkan. Upaya ini dapat memperkuat kesiapsiagaan BPBD Kota Blitar dalam menghadapi bencana. **Kata kunci:** Manajemen Logistik, Bencana Hidrometeorologi, BPBD, Distribusi Logistik, Tanggap Darurat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut data dari United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) periode 1977 sampai 2009, Indonesia menempati urutan kesembilan dunia sebagai negara dengan potensi bencana tinggi (Terminology & Reduction, 2009). Sebagian besar bencana di Indonesia (96,8%) adalah bencana hidrometeorologi, sedangkan sisanya (3,2%) merupakan bencana geologi (Rosyida et al., 2019). Faktor meteorologi seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan angin berperan besar dalam terjadinya bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, banjir, dan tanah longsor.

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan total penduduk sekitar 41,14 juta jiwa (BPS, 2021). Secara geografis, Jawa Timur berada di ujung timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Provinsi Jawa Tengah di barat, Selat Bali di timur, dan Samudera Hindia di selatan. Kota Blitar, sebagai kota terkecil kedua di provinsi ini dengan kepadatan penduduk 4.835 jiwa per km², memiliki sumber daya alam terbatas dan perekonomian yang bergantung pada sumber daya manusia dan buatan. Kota ini termasuk dalam zona rawan bencana hidrometeorologi, seperti banjir lahar hujan, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, dan angin puting beliung. Parameter seperti tingkat keterbukaan lahan, curah hujan tahunan, dan kemiringan lereng mempengaruhi tingkat

bahaya cuaca ekstrem di kota ini. Pada 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar mencatat 47 kejadian bencana terkait cuaca ekstrem, didominasi oleh hujan lebat disertai angin kencang.

Gambar 1 Tingkat Bahaya Cuaca Ekstrem

No	Kelurahan	Kecamatan	Indeks Bahaya	Tingkat Bahaya	Luas (m2)	Luas (Hektar)
1	Bendo	Kepanjenkidul	0,999	TINGGI	1.181.700	118,17
2	Sentul	Kepanjenkidul	0,999	TINGGI	2.273.600	227,36
3	Tanggung	Kepanjenkidul	0,999	TINGGI	2.469.900	246,99
4	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul	0,999	TINGGI	930.900	93,09
5	Kepanjenlor	Kepanjenkidul	0,999	TINGGI	704.400	70,44
6	Ngadirejo	Kepanjenkidul	0,999	TINGGI	1.904.800	190,48
7	Kauman	Kepanjenkidul	0,999	TINGGI	833.800	83,38
8	Bendogerit	Sananwetan	0,999	TINGGI	2.229.200	222,92
9	Rembang	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.067.900	106,79
10	Plosokerep	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.222.500	122,25
11	Klampok	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.665.200	166,52
12	Karangtengah	Sananwetan	0,999	TINGGI	2.142.500	214,25
13	Gedog	Sananwetan	0,999	TINGGI	3.258.500	325,85
14	Sananwetan	Sananwetan	0,999	TINGGI	1.875.300	187,53
15	Blitar	Sukorejo	0,999	TINGGI	1.602.700	160,27
16	Sukorejo	Sukorejo	0,999	TINGGI	1.509.200	150,92
17	Turi	Sukorejo	0,999	TINGGI	527.600	52,76
18	Karangsari	Sukorejo	0,999	TINGGI	904.900	90,49
19	Tlumpu	Sukorejo	0,999	TINGGI	862.700	86,27
20	Pakunden	Sukorejo	0,999	TINGGI	2.348.800	234,88
21	Tanjungsari	Sukorejo	0,999	TINGGI	2.424.600	242,46
TOTAL				TINGGI	33.940.700	3394,07

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar Tahun 2024

Penanggulangan bencana diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menjadi pedoman dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana secara terencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan ini. Manajemen logistik menjadi aspek krusial dalam semua tahap tersebut, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian bantuan, dan distribusi kepada korban. Manajemen logistik diatur oleh Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008, sementara pelaksanaannya di tingkat daerah berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di Kota Blitar, manajemen logistik dijalankan oleh Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Logistik BPBD yang mengatur kebijakan teknis, koordinasi mitigasi, kesiapsiagaan, dukungan logistik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan manajemen logistik, terdapat tujuh prinsip penting yaitu tepat jenis, kualitas, kuantitas, waktu, sasaran, biaya, dan pelaporan. Pemerintah memiliki personel, anggaran, peralatan, dan logistik yang terbatas (Sutiyo dan Eviany, 2023). Namun, di Kota Blitar terdapat masalah pada tahap pergudangan dan pemeliharaan logistik. Gudang yang terbatas menyebabkan penempatan barang tidak rapi dan sulit diakses sehingga menghambat pencarian kebutuhan saat bencana. Keterbatasan ruang juga membuat barang lebih cepat rusak, sementara pemeliharaan barang tidak dilakukan secara rutin dan sistematis. Barang yang rusak harus segera diperbaiki agar siap digunakan saat terjadi bencana. Melihat permasalahan tersebut, penelitian lebih lanjut mengenai manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar Kota Blitar lebih siap dalam menghadapi bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan, khususnya dalam pengelolaan logistik untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah (gap penelitian) dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar, khususnya pada aspek pergudangan, pemeliharaan logistik, dan kekurangan personel yang mengelola logistik. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Prayitno & Fairus (2022) di Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Shafwan Ode dan Ida Yunari Ristiani (2024) di Kota Kendari, serta Rudy (2023) di Kabupaten Pati, telah membahas manajemen logistik bencana, fokus dan ruang lingkup mereka berbeda dengan permasalahan yang dihadapi di Kota Blitar. Penelitian ini menyoroti masalah yang sangat spesifik dan unik di Kota Blitar, yaitu keterbatasan kapasitas gudang yang menyebabkan penempatan logistik tidak teratur dan berantakan, sehingga memperlambat distribusi bantuan kepada korban saat bencana terjadi.

Selain itu, salah satu faktor penting yang belum banyak diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah pengelolaan logistik yang dilakukan oleh sangat sedikit personel, bahkan dalam beberapa kasus hanya satu orang yang menangani seluruh proses dari perencanaan hingga pelaporan. Hal ini berisiko menimbulkan kelambatan dan kekacauan dalam penanganan bencana, terutama ketika bencana terjadi secara bersamaan. Masalah lainnya yang belum mendapat perhatian cukup banyak dalam literatur sebelumnya adalah pemeliharaan logistik yang tidak dilakukan secara teratur dan sistematis, menyebabkan kerusakan pada barang-barang logistik yang seharusnya siap digunakan saat dibutuhkan.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena tidak hanya menyentuh aspek-aspek yang belum banyak dibahas, tetapi juga menawarkan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana hidrometeorologi di Kota Blitar. Dalam penelitian sebelumnya, banyak yang berfokus pada permasalahan logistik yang lebih umum atau yang terjadi di daerah lain, namun tidak ada yang secara spesifik menyoroti permasalahan yang terjadi di Kota Blitar, yang memiliki karakteristik geografis, sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai manajemen logistik bencana di daerah rawan bencana seperti Kota Blitar dan menjadi referensi penting untuk perbaikan sistem logistik bencana di wilayah lain yang memiliki tantangan serupa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah yang menggambarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik atau tema yang serupa. Bagian ini berfungsi sebagai referensi dan bahan perbandingan yang berguna bagi peneliti baru agar dapat memahami kesamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat menemukan dasar perbandingan yang kuat serta menjaga orisinalitas karya yang dibuat.

Penelitian pertama dilakukan oleh Prayitno & Fairus (2022) berjudul “*Kinerja dan Kendala Manajemen Logistik Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Gunung Kidul*” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mengacu pada teori Fungsi Manajemen Logistik dari Suprihatno (2014). Penelitian ini mengungkapkan bahwa peralatan yang digunakan dalam manajemen bencana telah sesuai dengan prosedur pemerintah, namun masih diperlukan peningkatan khususnya pada tahap perencanaan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada konsep manajemen logistik serta metode penelitian kualitatif yang digunakan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada kinerja dan kendala yang dialami oleh Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Blitar dan membahas aspek manajemen logistik secara lebih luas.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ode & Ristiani (2024) yang berjudul “*Manajemen Logistik Bencana Banjir Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*” juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan mengacu pada teori manajemen logistik oleh H. Subagya (1990). Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam manajemen logistik bencana banjir, yaitu keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah konsep manajemen logistik dan penggunaan metode kualitatif, sedangkan perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Kota Blitar.

Penelitian ketiga oleh Rudy (2023) berjudul “*Penerapan Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Korban Bencana Alam Banjir di Kabupaten Pati*” menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berfokus pada penerapan manajemen logistik BPBD dalam penanganan korban bencana alam banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan berjalan dengan efektif dan efisien, namun terdapat kendala terkait barang yang kedaluwarsa dan rusak selama penyimpanan. Penelitian ini memiliki persamaan pada konsep dan metode penelitian, namun perbedaannya adalah pada cakupan fokus yang hanya membahas tahap pergudangan dan distribusi logistik, sementara penelitian ini membahas manajemen logistik secara keseluruhan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mandasini & Andriani (2023) berjudul “*Analisis Pelaksanaan Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Di BPBD Kabupaten Mamuju Tengah*” juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data induktif serta mengacu pada teori Manajemen Logistik dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana oleh Dyah Kusumastuti (2019). Penelitian ini menemukan bahwa masalah koordinasi menjadi penghambat utama dalam distribusi logistik yang efektif, sehingga dibutuhkan fasilitas penyimpanan yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada konsep manajemen logistik dan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mamuju Tengah, sementara penelitian saat ini berada di Kota Blitar.

Penelitian kelima oleh Purwanto (2020) yang berjudul *“Tata Kelola Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan”* menggunakan metode kualitatif dengan teori Manajemen Risiko Bencana oleh Kodoatie & Sjarief (2006). Penelitian ini menyoroti tata kelola bantuan logistik korban bencana banjir di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, dan menemukan bahwa distribusi logistik belum terlaksana dengan baik. Selain itu, SOP penanganan bantuan logistik kurang diterapkan dan penanganan bencana kurang didukung oleh peran pemerintah dan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah penggunaan metode kualitatif, namun fokusnya lebih pada mekanisme pendistribusian bantuan logistik, sedangkan penelitian ini membahas seluruh tahapan pengelolaan logistik secara menyeluruh.

Penelitian keenam oleh Camilo & Medina (2025) berjudul *“Coordination mechanisms applied to logistical systems for local disaster preparedness: a Latin American case”*. Kedua penelitian ini sama membahas manajemen logistik dalam bencana hidrometeorologi, namun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian Camilo menggunakan model simulasi berbasis agen (ABM) untuk mengevaluasi tiga mekanisme koordinasi bencana di Kolombia, dengan hasil menunjukkan keunggulan mekanisme terdesentralisasi dalam efisiensi dan fleksibilitas. Sementara itu, penelitian ini mengkaji tantangan manajemen logistik di BPBD Kota Blitar, Indonesia, seperti keterbatasan gudang dan kekurangan personel, dengan rekomendasi perbaikan praktis. Meskipun keduanya fokus pada logistik bencana, penelitian pertama bersifat teoretis dengan simulasi, sedangkan yang kedua lebih berfokus pada masalah nyata di lapangan.

Penelitian ketujuh oleh Ghazali et al. (2025) berjudul *“A Review Of Key Activities In Hydro Meteorological Disaster Management”*. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus utama, yaitu pengelolaan bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Keduanya menyoroti pentingnya perencanaan logistik, koordinasi antara berbagai pihak, serta keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian ini lebih terfokus pada tantangan logistik di tingkat lokal di Kota Blitar, Indonesia, dan mengidentifikasi hambatan praktis dalam manajemen bencana, seperti keterbatasan gudang dan kekurangan personel. Sebaliknya, penelitian Ghazali mengenai bencana hidrometeorologi lebih umum dan membahas aktivitas-aktivitas penting dalam tiga fase bencana (pra, saat, dan pasca-bencana), dengan penekanan pada sistem peringatan dini, kesadaran masyarakat, serta pemulihan pasca-bencana, yang melibatkan pengembalian infrastruktur dan pemulihan mental korban.

Penelitian kedelapan oleh Zhang et al. (2025) berjudul *“Research On Location-Inventory-Routing Optimization Of Emergency Logistics Based On Multiple Reliability Under Uncertainty”*. Penelitian tentang model logistik darurat berbasis pemrograman stokastik memiliki fokus yang sama pada manajemen logistik dalam bencana, namun dengan pendekatan dan cakupan yang berbeda. Keduanya membahas upaya untuk meningkatkan efisiensi respons terhadap bencana, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada tantangan praktis di tingkat lokal, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan dan sumber daya manusia di Kota Blitar. Sementara itu, penelitian Zhang mengusulkan model pemrograman stokastik dua tahap yang kompleks untuk perencanaan logistik darurat dengan mempertimbangkan ketidakpastian dalam permintaan, pasokan, dan waktu transportasi. Penelitian Zhang juga menggunakan algoritma genetik untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan dalam tahap kesiapsiagaan dan respons bencana, dengan studi kasus pada gempa bumi di Sichuan, China. Meskipun keduanya berfokus pada manajemen logistik bencana, penelitian ini lebih terfokus pada kondisi lokal dan tantangan langsung, sedangkan penelitian Zhang mengembangkan model matematis yang lebih luas untuk mengoptimalkan logistik darurat secara teoritis.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar, yang sebelumnya belum secara spesifik dibahas dalam literatur terkait. Meskipun berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Prayitno & Fairus (2022), Muhammad Shafwan Ode dan Ida Yunari Ristiani (2024), serta Rudy (2023), telah mengkaji manajemen logistik bencana di berbagai daerah, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti permasalahan unik yang dihadapi di Kota Blitar. Penelitian ini meneliti hambatan-hambatan yang bersifat lokal dan spesifik, seperti keterbatasan kapasitas gudang, kekurangan personel pengelola logistik, dan ketidakberaturan dalam pemeliharaan logistik yang belum dilakukan secara sistematis dan terjadwal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan pemahaman mengenai praktik manajemen logistik darurat, tetapi juga menawarkan analisis yang lebih terperinci terhadap tantangan yang dihadapi oleh BPBD Kota Blitar, serta upaya-upaya inovatif yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sebagai tambahan kebaruan, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung terbatas pada aspek tertentu dari manajemen logistik, seperti distribusi logistik (Rudy, 2023) atau pengelolaan peralatan (Mandasini & Andriani, 2023). Penelitian ini mengkaji seluruh tahapan manajemen logistik darurat secara holistik, mulai dari perencanaan, pengadaan, penganggaran, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pengendalian logistik dengan menggunakan teori oleh (H. Subagya, 1990). Pendekatan ini menjadikan penelitian ini lebih menyeluruh dan menyasar pada pemecahan masalah yang terjadi dalam konteks logistik bencana di Kota Blitar. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, tidak hanya untuk meningkatkan sistem manajemen logistik darurat di Kota Blitar, tetapi juga untuk memperkaya kajian manajemen logistik bencana di daerah-daerah rawan bencana dengan karakteristik serupa.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Logistik Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang terjadi di lapangan, sesuai dengan konteks lokal (Simangunsong F., 2017). Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh, dengan mengidentifikasi pola yang muncul dalam observasi dan wawancara. Hal ini relevan untuk menggali masalah yang lebih kompleks terkait manajemen logistik bencana.

Informan kunci dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Logistik, serta staf yang terlibat langsung dalam manajemen logistik bencana. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran mereka yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai operasional logistik di BPBD Kota Blitar. Penelitian ini dilaksanakan selama periode 6 hingga 25 Januari 2025 di Kota Blitar, dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data secara sistematis dalam bentuk tabel dan uraian, serta penarikan kesimpulan yang valid dan kredibel berdasarkan data lapangan (Creswell & Creswell, 2018). Operasionalisasi konsep menggunakan teori fungsi manajemen logistik

menurut (H. Subagya, 1990) yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian logistik. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan kunci dari BPBD Kota Blitar, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan manajemen logistik bencana di Kota Blitar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Logistik Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Blitar

BPBD Kota Blitar sudah memiliki daftar daerah rawan bencana hidrometeorologi yang sering melanda wilayahnya. Daftar itu memberikan gambaran lokasi-lokasi yang kerap terdampak bencana, sehingga memudahkan BPBD bersama pemerintah dan masyarakat dalam pelaporan serta penanganan ketika terjadi bencana. Pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat dilaksanakan sesuai peraturan dan tugas pokok BPBD, dengan pembagian bidang untuk penanggulangan, kesiapsiagaan, dan logistik. Hal ini memungkinkan proses manajemen berjalan lebih terfokus, efektif, dan efisien, serta pelaporan pertanggungjawaban sesuai SOP. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen logistik berjalan baik dan sesuai tupoksi, walaupun ada hambatan seperti keterbatasan gudang dan minimnya tenaga di bidang logistik. Meski begitu, BPBD Kota Blitar tetap dapat menyalurkan logistik ke masyarakat terdampak secara optimal. Dalam kegiatannya, BPBD tidak bekerja sendiri, tetapi menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat agar seluruh proses manajemen logistik berjalan lancar menurut prinsip 7 ketepatan dan aturan yang berlaku.

Distribusi logistik dilakukan BPBD melalui Kepala Desa, RT, RW, atau tokoh masyarakat yang menandatangani bukti penerimaan barang. Tindakan tanggap bencana secara umum sudah berjalan baik walaupun ada kendala seperti gudang yang sempit, menyebabkan logistik berantakan, sulit dicari, dan kadang terlambat didistribusikan. Hambatan lain adalah minimnya SDM, karena urusan logistik umumnya ditangani hanya satu orang, sehingga kewalahan jika terjadi bencana bersamaan. Namun, hambatan ini masih dapat diatasi oleh BPBD. Saat tanggap darurat, BPBD membentuk posko, membuka call center berbasis Whatsapp agar masyarakat bisa segera melapor. Call center terbagi dua: terhubung ke Pusat Pengendalian Operasional dan unit reaksi cepat. BPBD wajib selalu siaga bersama peralatan pendukung. Meski keterbatasan gudang menyebabkan alat tersimpan tidak beraturan dan mudah rusak, hal ini tidak menghambat tanggap darurat karena BPBD memprioritaskan peralatan yang masih layak pakai.

3.1.1 Manajemen Logistik dalam Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

URC BPBD Kota Blitar berperan penting dalam merencanakan kebutuhan logistik bencana hidrometeorologi. Tim langsung turun ke lokasi bencana untuk mengamati dampak, jumlah korban, dan kebutuhan. Data lapangan yang dikumpulkan menjadi dasar perencanaan kebutuhan prioritas, sehingga jumlah dan jenis logistik yang akan disalurkan sesuai dengan skala dan dampak bencana. Proses perencanaan berjalan dengan cepat karena didukung informasi langsung dari lapangan. Namun, perencanaan tetap harus fleksibel karena kebutuhan di lapangan bisa berubah atau lebih besar dari perkiraan. Penentuan kebutuhan juga dibantu pemerintah setempat seperti RT/RW yang memahami kondisi masyarakat. Jenis logistik yang sering diberikan meliputi terpal, air bersih, sandang, sembako, serta koordinasi dengan Puskesmas untuk bantuan kesehatan. Berikut contoh kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data BPBD:

Tabel 1. Kebutuhan Dasar Korban Bencana Hidrometeorologi

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Paket Makan	79 Buah	Baik
2	Lauk Pauk	2 Kardus	Baik
3	Tambahan Gizi	6 Kardus	Baik
4	Paket Sandang	3 Tas	Baik
5	Matras	110 Buah	Baik
6	Tenda Keluarga	4 Buah	Baik
7	Terpal	46 Buah	Baik
8	Bantal	7 Buah	Baik
9	Selimut	12 Buah	Baik
10	Peralatan Bayi	50 Buah	Baik
11	Paket Kebersihan Keluarga	32 Buah	Baik
12	Dispenser	1 Buah	Baik
13	Teko Plastik	56 Buah	Baik
14	Velbed	350 Buah	Baik
15	Kebutuhan Lansia	-	Baik
16	Lampu	7 Buah	Baik
17	Tenda	6 Buah	Baik
18	Genset	2 Buah	Baik 1, Rusak Berat 1
19	Lampu Emergency	2 Buah	Baik
20	Paket Rekreasional	77 Buah	Baik

Sumber: BPBD Kota Blitar tahun 2024

Manajemen logistik perlu dikelola dengan baik dari perencanaan hingga sampai ke tangan masyarakat yang terdampak bencana, serta di pertanggungjawabkan melalui pelaporan. Mengingat segala tahapannya dikendalikan oleh satu orang, menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kota Blitar membutuhkan personil tambahan di bidang ini. Hambatan lain dikemukakan oleh Unit Reaksi Cepat yang langsung terjun ke lapangan dalam pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat. Mas Bagus sebagai salah satu dari tim Unit Reaksi cepat pada wawancara (Selasa, 7 Januari 2025) mengungkapkan:

“Mungkin ini bisa dibilang hambatan bisa dibilang bukan sih mbak. Terkadang pada saat kami turun ke lapangan untuk melakukan assessment, ada yang terdampak parah, ada yang hanya sedikit. Kami mendata sesuai dengan ketentuan dan menentukan yang mana yang mendapatkan bantuan. Pada saat dibagikan, masyarakat yang terdampak sedikit, tidak terima dan melakukan protes, sehingga mau tidak mau harus kami berikan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BPBD Kota Blitar juga menghadapi tantangan sosial dalam proses pelaksanaan tugas di lapangan. Salah satunya adalah permasalahan yang muncul saat melakukan assessment atau pendataan terhadap warga terdampak bencana. Dalam proses assessment, petugas BPBD bertugas untuk mendata tingkat kerusakan dan dampak yang dialami masyarakat, yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Masalah muncul ketika hasil pendataan menunjukkan adanya perbedaan tingkat dampak yang dialami warga. Beberapa warga mengalami kerusakan atau dampak bencana yang cukup parah, sementara sebagian lainnya hanya mengalami dampak ringan. Sesuai prosedur, BPBD menetapkan prioritas pemberian bantuan kepada warga yang terdampak paling parah. Namun, situasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Warga yang terdampak lebih ringan sering kali merasa tidak terima ketika tidak mendapatkan bantuan, dan bahkan melakukan protes.

Kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi BPBD. Di satu sisi, mereka harus menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, namun di sisi lain, mereka juga harus merespons dinamika sosial di masyarakat agar tidak menimbulkan ketegangan. Akhirnya, dalam beberapa kasus, BPBD terpaksa memberikan bantuan kepada warga yang sebenarnya tidak terlalu terdampak, demi menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari konflik sosial di lokasi bencana. Manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan tupoksi dan aturan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. Tetapi BPBD akan mengupayakan yang terbaik agar manajemen logistik berjalan sesuai dengan seharusnya, dan mengupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, dan mengurangi penderitaan korban.

3.1.2 Manajemen Logistik dalam Pengadaan

BPBD Kota Blitar melakukan pengadaan logistik secara rutin setiap awal tahun, kecuali jika stok yang ada masih mencukupi untuk tahun berikutnya. Pengadaan diawali dengan evaluasi stok yang ada di gudang untuk memastikan kebutuhan logistik yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kebutuhan logistik disusun dan diajukan ke pemerintah kota melalui mekanisme penganggaran resmi. Pengadaan logistik dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti lelang, penunjukan langsung, atau mekanisme lain yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada saat terjadi kekurangan stok logistik akibat bencana, BPBD Kota Blitar segera melakukan pengadaan logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan dikoordinasikan dengan pejabat terkait. Dalam kondisi darurat, pengadaan ini juga bisa melibatkan bantuan dari luar, seperti BPBD kabupaten/kota lain, BPBD Provinsi, atau BNPB untuk memastikan ketersediaan logistik yang cukup. Selain itu, BPBD Kota Blitar juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk penyediaan air bersih dan Puskesmas untuk pengadaan obat-obatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kota Blitar, pengadaan ini merupakan bagian dari sistem yang dirancang untuk menjamin kelancaran distribusi bantuan logistik pada saat-saat kritis, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak selama bencana.

3.1.3 Manajemen Logistik dalam Fungsi Penganggaran

BPBD memperoleh anggaran dari APBD Kota Blitar yang dipakai untuk seluruh kegiatan termasuk pengadaan logistik. Rencana anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan, dan jika ada kebutuhan mendadak, bisa dilakukan perubahan anggaran (DPPA). Dana darurat (Bantuan Tidak Terduga/BTT) disiapkan khusus mengantisipasi kejadian tak terduga agar BPBD bisa bertindak cepat tanpa menunggu proses administrasi panjang. Pada 2023, BPBD mengalokasikan Rp361.957.653 untuk logistik, dengan realisasi 95,77% atau Rp346.633.525. Tingginya realisasi mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik, sehingga logistik bisa disediakan dengan cepat saat bencana.

3.1.4 Manajemen Logistik dalam Fungsi Pemeliharaan

Pemeliharaan logistik dan peralatan dilakukan rutin serta terjadwal. Termasuk pengecekan fisik, tanggal kedaluwarsa, dan kelayakan penyimpanan. Barang yang mendekati kedaluwarsa diprioritaskan untuk didistribusikan atau dipakai untuk simulasi/pelatihan, serta langsung diganti jika sudah tidak layak. Pencatatan kedaluwarsa dilakukan secara tertib, terutama pada makanan siap saji. Peralatan yang digunakan wajib dibersihkan dan dicek lagi setelah penggunaan, sedangkan peralatan yang tidak dipakai akan dicek kembali minimal setiap 3 bulan agar tetap berfungsi optimal bila dibutuhkan.

3.1.5 Manajemen Logistik dalam Penyimpanan dan Penyaluran

BPBD Kota Blitar mengelola tiga gudang, dua di kantor dan satu di SMP 5 Blitar (pinjaman karena gudang kantor tidak cukup). Sempitnya ruang menyebabkan sebagian logistik disimpan di area parkir menggunakan kotak besi agar tetap aman. Sistem penyimpanan logistik menggunakan FIFO (First In First Out) supaya barang yang masuk lebih dulu dikeluarkan lebih dulu, mencegah kedaluwarsa. Penempatan logistik di luar ruangan menimbulkan permasalahan baru, yaitu risiko kerusakan akibat paparan cuaca dan lingkungan. Kondisi ini tentu dapat mengurangi kualitas dan ketahanan logistik kebencanaan, yang seharusnya selalu siap pakai dalam kondisi baik saat dibutuhkan. Masalah keterbatasan gudang ini menjadi hambatan paling terasa yang dihadapi BPBD Kota Blitar dalam upaya menjaga ketersediaan dan kesiapsiagaan logistik penanggulangan bencana. Kapasitas ketersediaan logistik meliputi makanan dan minuman, pakaian, obat-obatan, peralatan medis, keperluan tidur, peralatan kebersihan, bahan bakar, dan lain-lain (Ristiani, 2020). Tidak hanya gudang menjadi hambatan dalam pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar. Pada wawancara (Rabu, 8 Januari 2025), Bapak Agus Suherli selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Blitar menyampaikan:

“Kalau menurut saya kami kekurangan sumber daya yang membantu dalam pengelolaan logistik. Karena pada dasarnya yang mengelola logistik dari awal hingga pelaporan semuanya hanya dipegang oleh Mas Dio, terkadang beliau kewalahan terutama saat bencana sering terjadi.”

Penyaluran logistik dilakukan dua cara: jika tanpa pengungsian, melalui Ketua RT/RW/Kepala Dusun secara simbolis, selanjutnya baru ke warga. Jika terjadi pengungsian, logistik langsung didistribusikan ke lokasi pengungsian agar kebutuhan darurat segera terpenuhi.

3.1.6 Manajemen Logistik dalam Penghapusan

Penghapusan logistik dilakukan untuk barang yang sudah didistribusikan maupun yang tidak layak pakai atau kadaluarsa. Penghapusan terdiri dari dua bentuk:

- a. Penghapusan dari data stok saat barang didistribusikan.

- b. Penghapusan barang rusak/kadaluarsa, yang selanjutnya bisa disalurkan ke masyarakat untuk segera dimanfaatkan sebelum masa kadaluarsa, atau dilakukan lelang untuk alat/barang tertentu melalui BPKAD Kota Blitar.

BPBD hanya memilah dan mencatat barang untuk dihapus, seluruh proses lelang menjadi tugas BPKAD. Kebijakan penghapusan bertujuan agar data persediaan tetap akurat, logistik selalu siap pakai, dan tidak terjadi pemborosan atau penumpukan barang yang sudah tidak layak.

3.1.7 Manajemen Logistik dalam Pengendalian

Pengendalian dilakukan agar semua proses berjalan baik, cepat, efisien, dan tetap akuntabel. Pengendalian meliputi proses penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga pelaporan logistik yang diawasi secara berkala dan dicatat dalam laporan keuangan SKPD. Setiap penyaluran logistik dilengkapi berita acara serah terima, memastikan transparansi dan pertanggungjawaban baik dari sisi administratif maupun pelaporan publik. BPBD juga melakukan koordinasi erat dengan BPBD daerah lain pada saat penyaluran bantuan lintas wilayah agar kebutuhan masyarakat benar-benar dapat dipenuhi dengan tepat dan cepat. Kolaborasi ini penting untuk distribusi logistik yang merata dan efisien terutama dalam kondisi bencana besar.

Manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar memiliki beberapa hambatan, diantaranya adalah sempitnya gudang yang dimiliki oleh kantor BPBD Kota Blitar yang digunakan untuk menyimpan logistik. Terdapat juga hambatan lain yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola logistik. Berikut pernyataan Bapak Dio sebagai Staf Bidang Logistik pada wawancara Senin, 6 Januari 2025:

“Sebenarnya kalau hambatan lapangan sih hambatan-hambatan biasa yang mudah ditangani dan tidak memiliki pengaruh dalam pelaksanaan. Tapi mungkin yang paling terasa adalah sempitnya gudang yang kami miliki. Pertamanya kami mempunyai dua gudang, dengan banyaknya barang yang dimiliki, peletakkannya lebih berantakan dan tidak semua logistik bisa masuk ke gudang, jadi banyak peralatan dan logistik yang diletakkan di luar gudang, sehingga mudah rusak.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, hambatan yang mereka hadapi di lapangan pada dasarnya bersifat ringan dan masih dapat ditangani tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas. Hambatan-hambatan teknis di lapangan umumnya merupakan permasalahan rutin yang sudah sering dihadapi oleh petugas, sehingga mereka telah memiliki pengalaman serta mekanisme penanganan yang efektif. Namun demikian, hambatan yang dirasakan paling signifikan justru berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, khususnya terkait ketersediaan ruang penyimpanan logistik. BPBD Kota Blitar awalnya memiliki dua gudang untuk menyimpan berbagai barang logistik kebencanaan. Seiring dengan bertambahnya jumlah logistik dan peralatan yang dimiliki, kapasitas kedua gudang tersebut menjadi tidak mencukupi. Akibatnya, penataan barang menjadi kurang teratur dan banyak logistik yang akhirnya harus diletakkan di luar gudang.

Kegiatan manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar sudah berjalan dengan cukup baik, sesuai dengan aturan dan tupoksinya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang diatasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Blitar. Beberapa hambatan yang dirasakan oleh BPBD Kota Blitar diantaranya adalah sempitnya gudang yang dimiliki oleh kantor yang digunakan untuk menyimpan logistik. Permasalahan kapasitas gudang mendorong

BPBD untuk mencari alternatif penyimpanan tambahan. BPBD Kota Blitar melaporkan perihal ini kepada Pemerintah Kota Blitar untuk dapat ditindaklanjuti. Setelah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Blitar, Badan Penanggulangan Bencana Kota Blitar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Blitar berupa satu gudang yang tidak terpakai di SMP 5 Blitar yang bisa digunakan untuk menyimpan logistik dan peralatan. Langkah ini sempat membantu, namun kapasitas gudang tersebut ternyata juga belum mampu menampung seluruh logistik yang ada. Bantuan yang diberikan ini, mampu menampung sebagian sisa logistik yang tidak tersimpan baik di luar gudang. Tetapi logistik dan peralatan diletakkan secara paksa dan berantakan di dalam gudang, karena kapasitas gudang masih belum memenuhi kebutuhan penyimpanan logistik dan peralatan.

Hambatan terkait gudang masih belum terselesaikan dengan penambahan gudang yang ada di SMP 5 Blitar, sehingga BPBD Kota Blitar kembali mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Blitar untuk menambah kapasitas gudang. Sehingga Pemerintah Kota Blitar memutuskan untuk melakukan perencanaan pemindahan kantor BPBD Kota Blitar ke tempat yang lebih luas. Upaya ini dilakukan untuk menambah kapasitas gudang, juga memudahkan dalam pengelolaan barang logistik dan peralatan, karena logistik dan peralatan tidak terpisah lokasinya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agus Suherli selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Blitar dalam wawancara (Rabu, 8 Januari 2025), sebagai berikut:

“Terkait hambatan dalam penyimpanan, kami sudah banyak melakukan upaya. Pertama kita letakkan barang logistik yang tidak muat di tempat parkir, dengan tetap memperhatikan keamanan supaya logistik tidak rusak. Selanjutnya juga kami meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Blitar dan ditindaklanjuti dengan peminjaman gudang di SMP 5 Blitar. Ternyata masih belum memenuhi kapasitas gudangnya. Kami pengajuan lagi ke Pemerintah Kota Blitar, dan terakhir ada rencana untuk pemindahan kantor BPBD Kota Blitar.”

Untuk mengatasi keterbatasan personil di bidang logistik dalam pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar melakukan beberapa upaya penting. Upaya utama yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan penambahan personil kepada Pemerintah Kota Blitar. Pengajuan ini didasari oleh kebutuhan yang mendesak akan tenaga logistik yang kompeten dalam mendukung pengelolaan logistik kebencanaan, mulai dari proses penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan logistik saat terjadi bencana. BPBD juga berupaya mengoptimalkan personil logistik yang tersedia dengan melakukan pembagian tugas yang lebih terstruktur agar pekerjaan di bidang logistik dapat tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan jumlah tenaga. Tidak hanya itu, BPBD Kota Blitar turut menjalin koordinasi dengan instansi terkait, organisasi masyarakat, serta relawan yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas logistik saat situasi darurat. Melalui berbagai langkah ini, BPBD berharap pengelolaan logistik kebencanaan di Kota Blitar dapat tetap berjalan lancar dan cepat, meskipun menghadapi kendala terbatasnya jumlah personil logistik.

Sementara menunggu proses tindak lanjut dari Pemerintah Kota Blitar terkait permohonan tersebut, BPBD Kota Blitar tetap berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan menugaskan salah satu personil, yaitu Mas Dio, sebagai penanggung jawab logistik. Mas Dio dikirim untuk mengikuti pelatihan khusus di bidang logistik kebencanaan, baik yang diselenggarakan di tingkat daerah maupun nasional. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan Mas Dio dalam menangani berbagai aspek pengelolaan logistik kebencanaan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, Mas Dio dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam tugas sehari-hari, serta mampu menjadi tenaga yang andal dalam mengelola logistik di BPBD Kota Blitar. Selain itu, hasil pelatihan

ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada personil lain melalui pelatihan internal atau berbagi pengalaman, sehingga kualitas pengelolaan logistik di lingkungan BPBD Kota Blitar dapat terus meningkat meskipun dengan keterbatasan jumlah personil.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Blitar dalam menghadapi dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan manajemen logistik, Ibu Sudarmini sebagai Kepala Bidang Penanggulangan, Kesiaspadaan dan Logistik dalam wawancara (Senin, 6 Januari 2025) mengungkapkan:

“Mengenai hambatan yang ada, kami telah melakukan upaya untuk meminimalisir supaya tidak mengganggu pembagian logistik kepada masyarakat. Kalaupun nanti semisal tiba-tiba ada gangguan lain, kami akan upayakan segala cara agar pemberian logistik kepada masyarakat tidak terganggu.”

BPBD Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir hambatan yang berpotensi mengganggu proses penyaluran logistik kepada masyarakat. Setiap kendala yang muncul diupayakan untuk segera ditangani agar tidak berdampak pada kelancaran distribusi bantuan, khususnya saat terjadi bencana. Jika di tengah pelaksanaan penyaluran bantuan terjadi gangguan atau kendala lain, BPBD berkomitmen penuh untuk segera mencari solusi yang paling tepat dan efektif. Seluruh sumber daya yang tersedia, baik manusia, peralatan, maupun teknologi, akan dikerahkan secara maksimal untuk memastikan proses distribusi logistik kepada masyarakat tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Prinsip ini diterapkan bukan hanya sebagai wujud tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan demikian, diharapkan bantuan yang disalurkan dapat diterima oleh masyarakat secara tepat waktu, merata, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. BPBD bertekad untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang sigap, tanggap, dan berorientasi pada kepentingan serta keselamatan warga.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan serta tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar. Secara faktual, BPBD Kota Blitar mampu melaksanakan seluruh fungsi manajemen logistik mulai dari perencanaan, pengadaan, penganggaran, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, hingga pengendalian logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan Unit Reaksi Cepat (URC) dan mekanisme koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat setempat menjadi faktor pendukung utama kelancaran proses penanganan logistik saat bencana terjadi. BPBD juga telah menerapkan sistem yang tertata, seperti penggunaan sistem FIFO (First In First Out) dalam penyimpanan dan penyaluran, serta memastikan pelaporan logistik berjalan secara transparan dan akuntabel (Prayitno & Fairus, 2022).

Namun, temuan penelitian juga mengidentifikasi adanya beberapa hambatan signifikan dalam pelaksanaan manajemen logistik, di antaranya keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan logistik yang mengakibatkan sebagian barang logistik terpaksa diletakkan di luar gudang—seperti di area parkir pegawai—yang berisiko menurunkan kualitas logistik akibat paparan cuaca dan lingkungan. Selain itu, BPBD Kota Blitar juga mengalami kekurangan sumber daya manusia di bidang logistik, sehingga seluruh tahapan pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, hanya dijalankan oleh satu staf utama. Dalam situasi terjadinya bencana secara bersamaan atau beruntun, kondisi ini menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi dan berpotensi memperlambat distribusi bantuan ke masyarakat terdampak (Mandasini & Andriani, 2023). Hambatan di lapangan juga meliputi tantangan

sosial saat pendistribusian bantuan, ketika petugas harus menghadapi protes dari warga yang merasa layak menerima bantuan namun tidak tercatat sebagai prioritas.

Dari sisi evaluasi, BPBD Kota Blitar telah menunjukkan upaya-upaya adaptif dan progresif dalam mengatasi hambatan yang ada. Misalnya, penambahan gudang baru di SMA 5 Blitar, pembagian logistik ke masyarakat yang logistiknya mendekati masa kedaluwarsa untuk mengurangi pemborosan, hingga pengajuan relokasi kantor BPBD ke lokasi yang lebih luas agar dapat menampung logistik secara lebih optimal. Dalam aspek sumber daya manusia, BPBD telah mengajukan permohonan penambahan staf logistik kepada pemerintah kota dan meningkatkan kapasitas staf melalui pelatihan khusus logistik kebencanaan. Secara prinsip, BPBD Kota Blitar berkomitmen menjaga pelayanan terhadap masyarakat tetap prima dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, intensif berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan.

Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan sarana-prasarana yang memadai serta penambahan tenaga logistik untuk memastikan manajemen logistik tanggap darurat berjalan lebih efektif. Peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas gudang, penambahan personel, dan pemeliharaan logistik secara berkala sangat diperlukan sebagai langkah strategis untuk meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi di Kota Blitar. Rekomendasi penelitian juga mengarahkan BPBD Kota Blitar agar terus memperkuat aspek manajemen logistik melalui perbaikan yang berkelanjutan demi memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan logistik secara cepat, tepat, dan merata.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain hasil utama yang telah diuraikan, penelitian ini juga menemukan sejumlah temuan menarik dalam pelaksanaan manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar. Salah satunya adalah adanya inisiatif inovatif BPBD Kota Blitar dalam menjaga efisiensi distribusi logistik, khususnya dalam menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas gudang dan personil. Untuk mengatasi keterbatasan ruang gudang, BPBD tidak hanya memanfaatkan fasilitas internal, tetapi juga memanfaatkan ruang milik pihak lain, seperti penggunaan gudang di SMP 5 Blitar. Bahkan, ketika ruang tersebut pun masih belum mencukupi, BPBD berinisiatif menempatkan logistik dalam kotak besi di area parkir kantor, sekaligus memastikan keamanan dan keawetan logistik meski dalam kondisi darurat. Inovasi lain yang dilakukan adalah penerapan sistem FIFO (*First In First Out*) untuk mendukung optimalisasi distribusi dan meminimalisir kerusakan atau kedaluwarsa barang.

Dari sisi sosial, penelitian menemukan adanya dinamika unik dalam penyaluran bantuan, di mana BPBD sering kali harus menyesuaikan prosedur pemberian bantuan akibat protes masyarakat yang merasa kurang menerima bantuan meskipun terdampak ringan. Hal ini menuntut fleksibilitas dan kecermatan aparat BPBD dalam menjaga kondusivitas masyarakat serta menjamin bahwa bantuan tetap diberikan secara adil namun tetap sesuai kebutuhan. Penelitian juga mencatat pentingnya koordinasi lintas sektor yang diinisiasi oleh BPBD Kota Blitar. Tidak hanya melibatkan perangkat daerah terkait, namun juga relawan, lembaga masyarakat, hingga institusi pendidikan dan kesehatan. Bentuk kerjasama ini terbukti mampu mempercepat proses penyaluran bantuan sekaligus memperluas jangkauan layanan darurat kepada masyarakat terdampak. Dalam beberapa kasus darurat yang membutuhkan bantuan logistik secara cepat dan mendesak, BPBD melakukan pengadaan logistik tambahan secara langsung di luar mekanisme tahunan, disertai dengan pengajuan perubahan anggaran (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran – DPPA) agar kebutuhan di lapangan dapat segera terpenuhi.

Temuan lain yang juga menjadi sorotan menarik adalah pengelolaan logistik kedaluwarsa secara bijak. BPBD memilih untuk segera menyalurkan logistik yang mendekati masa kedaluwarsa kepada masyarakat yang membutuhkan, disertai berita acara resmi, sehingga logistik tidak terbuang sia-sia dan proses pengelolaan tetap akuntabel. Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, penelitian ini menyoroti upaya berkelanjutan BPBD Kota Blitar untuk meningkatkan kualitas staf melalui pelatihan-pelatihan khusus logistik kebencanaan, meski jumlah personil masih terbatas. Hasil pelatihan ini kemudian disebarluaskan dalam lingkup internal sehingga pengetahuan dan keterampilan manajemen logistik dapat terus berkembang. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini mencerminkan adaptasi, inovasi lokal, dan kolaborasi sebagai kunci utama keberhasilan manajemen logistik tanggap darurat di Kota Blitar. Meski menghadapi keterbatasan sarana dan personil, BPBD tetap mampu menjaga efektivitas distribusi logistik serta memastikan bantuan sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan tepat waktu dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh BPBD Kota Blitar sesuai dengan aturan dan tupoksi, mencakup seluruh fungsi manajemen logistik seperti perencanaan, pengadaan, penganggaran, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengendalian, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan kapasitas gudang dan kurangnya staf logistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPBD Kota Blitar telah melakukan upaya seperti koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan gudang, memanfaatkan fasilitas pinjaman di SMP 5 Blitar, serta merencanakan pemindahan kantor ke lokasi yang lebih memadai, selain meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop guna memastikan efektivitas dan efisiensi distribusi logistik saat bencana terjadi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian mengenai manajemen logistik tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Blitar ini memiliki beberapa keterbatasan yang patut dicermati dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar, sehingga hasil dan temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasi pada daerah atau lembaga lain dengan kondisi geografis, sumber daya, dan sistem penanggulangan bencana yang berbeda. Keterbatasan kedua terdapat pada aspek sumber data; penelitian ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan informan terbatas-yaitu personil kunci di lingkungan BPBD Kota Blitar-sehingga potensi bias subjektivitas informan sangat mungkin terjadi. Selain itu, cakupan analisis dalam penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen logistik serta faktor penghambat dan upaya penanggulangannya dari perspektif internal BPBD. Penelitian belum secara ekstensif melibatkan atau membandingkan perspektif pihak eksternal (seperti perangkat desa, masyarakat terdampak, atau instansi lintas sektoral lain) yang terlibat dalam distribusi dan penyaluran logistik saat bencana terjadi. Oleh sebab itu, dinamika sosial, tantangan kolaboratif, serta koordinasi multi-stakeholder yang lebih luas masih belum tergambarkan secara menyeluruh dalam studi ini. Selanjutnya, keterbatasan lain terletak pada dimensi waktu dan rentang observasi. Penelitian dilakukan dalam periode tertentu (Januari 2025), sehingga hasil analisis sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual, kebijakan, dan sistem yang berlaku pada saat itu. Perubahan kebijakan, dinamika organisasi, maupun perkembangan teknologi logistik di masa mendatang belum tercakup dalam uraian penelitian ini. Akhirnya, peneliti juga menyadari adanya keterbatasan dalam akses data sekunder dan arsip resmi mengenai logistik kebencanaan, yang pada praktiknya dibatasi

oleh kebijakan internal instansi serta tidak seluruhnya terdokumentasi secara terbuka. Dengan segala keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan tetap dapat memberikan kontribusi positif sebagai referensi awal dan evaluasi praktis dalam upaya peningkatan manajemen logistik tanggap darurat di daerah rawan bencana, khususnya di Kota Blitar. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan generalisabel, penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak informan, lintas instansi, serta kajian perbandingan antar-daerah sangat disarankan ke depannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian mendatang dapat memperluas field ke daerah lain yang juga rawan bencana hidrometeorologi, untuk membandingkan efektivitas manajemen logistik antar wilayah. Dari sisi issue, riset lanjutan perlu menggali pemanfaatan teknologi informasi dalam distribusi logistik, serta tantangan sosial dan koordinasi antar pihak terkait. Untuk extension, penelitian berikutnya dapat menguji model manajemen logistik berbasis digital, meneliti dampak pelatihan SDM secara berkelanjutan, dan mengevaluasi inovasi atau solusi yang direkomendasikan dalam penelitian ini agar dapat diadopsi di BPBD maupun daerah lain.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, atas segala dukungan, bantuan, dan kesempatan yang telah diberikan selama proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian. Seluruh pimpinan, staf, serta pihak terkait di BPBD Kota Blitar telah memberikan informasi, arahan, serta fasilitas yang sangat membantu kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan kerja sama yang telah terjalin dapat menjadi amal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi upaya penanggulangan bencana di Kota Blitar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2024). IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Camilo, J., & Medina, P. (2025). *Coordination mechanisms applied to logistical systems for local disaster preparedness : a Latin American case*. May, 2025. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-09-2023-0085>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Ghazali, A., Chuan, N. M., Muda, R. rasbi, & Nokhairi, F. (2025). *A review of key activities in hydro meteorological disaster management*. May, 23118. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.35.23118>
- H. Subagya. (1990). *Manajemen logistik*. C. V. Haji Masagung.
- Kodoatie, & Sjarief. (2006). *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Nuansa Aulia.
- Mandasini, A. A., & Andriani, B. (2023). *Analisis Pelaksanaan Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Di BPBD Kabupaten Mamuju Tengah*. 6(2), 269–274.

<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6073/4052>

Ode, M. S., & Ristiani, I. Y. (2024). *MANAJEMEN LOGISTIK BENCANA BANJIR DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA*. 1–23. <http://eprints.ipdn.ac.id/18209/>

Prayitno, D., & Fairus, F. A. (2022). Kinerja dan Kendala Manajemen Logistik Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(2), 94–106. <https://doi.org/10.54131/jbma.v9i2.140>

Purwanto, G. (2020). Tata Kelola Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. *Jurnal MoZaiK*, 12(2), 72–84. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/1480>

Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 126–138. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113>

Rosyida, A., Nurmasari, R., Bnpb, S., Data Spasial BNPB, K., & Kunci, K. (2019). Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi Dan Geologi Di Indonesia Dilihat Dari Jumlah Korban Dan Kerusakan (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 12–21. <https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/view/127>

Rudy, T. (2023). Penerapan Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Korban Bencana Alam Banjir di Kabupaten Pati. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2(02), 79–83. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i02.279>

Simangunsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Suprihatno. (2014). *Manajemen*. Gadjah Mada University Press.

Sutiyo dan Eviany. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. PT Nas Media Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3dDSEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=perlindungan+masyarakat&ots=WklFpsnt8o&sig=f95rrJcQoL1TuNlcF1Pqw7jkntg>

Terminology, U., & Reduction, D. R. (2009). Comment: In engineering terms, acceptable risk is also used to assess and define the structural and non-structural measures that are needed in order to reduce possible harm to people, property, services and systems to a chosen tolerated level, according t. *Building*, 2009, 1–13.

Zhang, L., Wang, J., Yuan, N., & Li, J. (2025). *Research on location-inventory-routing optimization of emergency logistics based on multiple reliability under uncertainty*. May, 110826. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110826>